



Ekonomi Publik pada Analisis Dampak Program Perlindungan Sosial Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Perkotaan

Ahmad Wahyudi Zein ^{1*}, Syifwa Nurdilla Gusvi ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id ^{1*}, nurdillaasyifwaaa@gmail.com ²

Abstract : *This study uses a qualitative literature review method to analyze the impact of social protection programs on poverty reduction in urban areas from a public economics perspective. The main focus of this research is to evaluate the effectiveness of various government social interventions such as cash assistance, basic needs subsidies, and social security, based on scholarly literature, journals, and official policy documents. Social protection programs are considered vital instruments in improving the welfare of poor and vulnerable populations, especially in urban environments with complex socio-economic dynamics. The findings show that well-planned and well-targeted social protection plays a significant role in reducing household expenditures among the poor, increasing purchasing power, and strengthening economic resilience. In addition, social protection can encourage economic participation among vulnerable groups through empowerment and improved access to basic services. This study also highlights the importance of institutional synergy and continuous evaluation to ensure that social protection policies have a long-term impact on poverty alleviation.*

Keywords: *cash assistance, inequality, literature review, poverty, public economics, purchasing power, social policy, social protection, urban areas, welfare.*

Abstrak : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka untuk menganalisis dampak program perlindungan sosial terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah perkotaan dalam perspektif ekonomi publik. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas berbagai bentuk intervensi sosial pemerintah seperti bantuan tunai, subsidi kebutuhan pokok, dan jaminan sosial, yang ditinjau dari berbagai literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi kebijakan. Program perlindungan sosial diyakini sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, terutama di daerah perkotaan yang memiliki dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang terencana dan tepat sasaran berperan signifikan dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan daya beli, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu, perlindungan sosial juga mampu mendorong partisipasi ekonomi kelompok rentan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga serta evaluasi berkelanjutan agar kebijakan perlindungan sosial berdampak jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan.

Kata kunci: bantuan tunai, daya beli, ekonomi publik, kebijakan sosial, kemiskinan, kesejahteraan, ketimpangan, perlindungan sosial, perkotaan, studi pustaka.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi publik merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang fokus pada intervensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial dan ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Salah satu wujud nyata dari intervensi tersebut adalah pelaksanaan program perlindungan sosial yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari risiko sosial ekonomi. Di tengah meningkatnya urbanisasi dan disparitas ekonomi di wilayah perkotaan, perlindungan sosial menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan. Urban poverty memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kemiskinan di pedesaan, karena dipengaruhi oleh dinamika pasar tenaga kerja, harga kebutuhan

pokok yang tinggi, dan akses terhadap layanan dasar yang terbatas. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi publik dalam menilai dampak perlindungan sosial terhadap kemiskinan di kota menjadi relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam. Studi ini memfokuskan pada telaah pustaka agar dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam konteks urban. (Putri & Handayani, 2021)

Perlindungan sosial mencakup berbagai program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi, baik yang bersifat jangka pendek seperti krisis ekonomi, maupun jangka panjang seperti ketimpangan struktural. Program seperti bantuan sosial tunai, subsidi pangan, dan jaminan sosial telah diimplementasikan oleh pemerintah dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Namun, efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini kerap dipertanyakan, terutama dalam konteks wilayah perkotaan yang memiliki permasalahan struktural yang kompleks. Dalam banyak kasus, tantangan utama terletak pada akurasi pendataan penerima manfaat, keberlanjutan program, dan koordinasi lintas lembaga. Oleh sebab itu, penelitian berbasis studi pustaka diperlukan untuk menelaah kembali berbagai literatur empiris yang membahas keberhasilan maupun kendala pelaksanaan perlindungan sosial di kota. Dengan pendekatan ini, dapat diperoleh gambaran umum tentang bagaimana teori ekonomi publik diterapkan dalam praktik sosial melalui kebijakan perlindungan sosial. (Yuliani & Santoso, 2022)

Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, di balik laju pertumbuhan yang tinggi, kota-kota di Indonesia juga menghadapi masalah kemiskinan yang tidak kalah serius. Penduduk miskin perkotaan sering kali bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, serta tinggal di permukiman padat yang minim akses layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, perlindungan sosial menjadi krusial tidak hanya untuk mencegah kemiskinan ekstrem, tetapi juga untuk membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi instrumen utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di kota, namun evaluasi keberhasilan program tersebut perlu ditinjau lebih lanjut secara teoritis dan empiris. Oleh karena itu, pendekatan literatur menjadi penting untuk menggali pembelajaran dari berbagai sumber dan memperkuat basis kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Fadillah & Arifin, 2023)

Dalam kerangka ekonomi publik, peran negara sebagai penyedia jaminan sosial merupakan bentuk tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan warga. Di perkotaan, intervensi sosial pemerintah menjadi lebih kompleks karena harus menjawab tantangan

ketimpangan, pengangguran terselubung, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial perlu didesain dengan mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi perkotaan, termasuk kemampuan fiskal pemerintah daerah dan kapasitas birokrasi dalam menyalurkan bantuan secara efektif. Literatur ekonomi publik menekankan bahwa perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi, tetapi juga sebagai investasi sosial yang dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang. Dalam studi ini, pendekatan kualitatif berbasis pustaka digunakan untuk merefleksikan berbagai pemikiran teoritis dan hasil penelitian sebelumnya mengenai kebijakan sosial yang relevan dengan konteks kemiskinan urban di Indonesia. (Rahayu & Wibowo, 2020)

Ketika dunia mengalami berbagai krisis, termasuk pandemi dan krisis ekonomi global, kelompok miskin perkotaan menjadi yang paling rentan terdampak. Perlindungan sosial dalam hal ini menjadi bantalan ekonomi yang sangat vital. Di Indonesia, berbagai kebijakan responsif telah dirancang untuk mengatasi dampak krisis, namun pertanyaannya tetap: sejauh mana program-program tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan? Oleh karena itu, kajian literatur ini menjadi penting untuk menganalisis keberhasilan program dari sudut pandang teori ekonomi publik dan pendekatan empiris sebelumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan sintesis hasil penelitian terdahulu, guna meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dalam menghadapi tantangan urban poverty yang terus berkembang. Studi ini memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis untuk memperkuat fondasi kebijakan sosial yang adil dan merata di wilayah perkotaan. (Mahendra & Sari, 2024)

2. TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis mengenai ekonomi publik memberikan dasar konseptual dalam memahami bagaimana intervensi pemerintah dapat menciptakan kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan, termasuk perlindungan sosial. Ekonomi publik menekankan pentingnya peran negara dalam mengoreksi kegagalan pasar yang tidak mampu menjamin distribusi pendapatan yang adil. Dalam konteks urban, kegagalan pasar terlihat dari tingginya ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar dan tingginya biaya hidup. Oleh karena itu, perlindungan sosial menjadi mekanisme yang dirancang untuk mengintervensi kondisi tersebut melalui pendistribusian ulang sumber daya, serta pemberian subsidi dan jaminan sosial. Teori ini juga menggarisbawahi bahwa peran negara tidak sekadar sebagai regulator, melainkan juga sebagai penyedia layanan yang proaktif dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan. Dalam tinjauan pustaka ini, teori ekonomi publik dijadikan kerangka utama untuk menilai

efektivitas program perlindungan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan di perkotaan. (Sutanto & Ramadhani, 2020)

Teori perlindungan sosial mengacu pada serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam literatur global, perlindungan sosial mencakup tiga komponen utama yaitu bantuan sosial (social assistance), jaminan sosial (social insurance), dan program ketenagakerjaan aktif (labor market programs). Ketiga komponen ini saling melengkapi dalam menciptakan jaring pengaman sosial, khususnya di wilayah perkotaan yang dinamis dan rawan gejolak ekonomi. Program seperti bantuan langsung tunai dan subsidi kebutuhan pokok termasuk dalam kategori bantuan sosial yang paling banyak diterapkan di Indonesia. Dalam teori ini, perlindungan sosial tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas produktif masyarakat miskin dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, keberlanjutan dan ketepatan sasaran program menjadi kunci utama keberhasilan perlindungan sosial menurut pendekatan teoritis ini. (Rahmadani & Yusuf, 2021)

Konsep kemiskinan dalam literatur ekonomi dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Sedangkan kemiskinan relatif merujuk pada kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat dalam satu wilayah. Di kawasan perkotaan, kemiskinan relatif sering kali menjadi isu dominan karena tingginya disparitas ekonomi dan sosial. Teori kemiskinan ini penting dalam memahami target dan cakupan dari program perlindungan sosial, apakah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mengurangi ketimpangan sosial. Dalam banyak penelitian, kemiskinan di perkotaan juga dikaitkan dengan akses yang tidak setara terhadap infrastruktur, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Dengan memahami pendekatan ini, maka evaluasi terhadap efektivitas program perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan menyeluruh. (Andriani & Setyawan, 2022)

Teori keadilan sosial juga menjadi landasan penting dalam pembentukan kebijakan perlindungan sosial. Konsep ini menekankan bahwa semua individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi. Dalam konteks ini, perlindungan sosial menjadi alat redistribusi yang tidak hanya bertujuan membantu yang miskin, tetapi juga untuk menciptakan struktur sosial yang lebih setara dan inklusif. Keadilan sosial tidak hanya dilihat dari segi hasil akhir (output), tetapi juga dari proses distribusi manfaat sosial yang transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan untuk mengkritisi mekanisme pelaksanaan perlindungan sosial di perkotaan

yang sering kali tidak menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan. Evaluasi berbasis keadilan sosial juga memungkinkan adanya rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. (Wijaya & Putra, 2023)

Teori pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa kebijakan sosial harus dirancang dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dalam konteks ini, perlindungan sosial tidak hanya dipandang sebagai alat jangka pendek untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara ekonomi dan sosial. Kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi sering kali menghadapi tantangan pembangunan yang timpang, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Teori pembangunan berkelanjutan mendorong pendekatan inklusif dalam merancang program perlindungan sosial agar mampu menjawab tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan ketimpangan digital. Dengan kerangka ini, perlindungan sosial menjadi bagian integral dari pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan antar lapisan masyarakat. (Lestari & Pranowo, 2024)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisis dampak program perlindungan sosial terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah perkotaan dalam perspektif ekonomi publik. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei, melainkan berfokus pada telaah kritis terhadap sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, buku akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data dari berbagai literatur yang membahas efektivitas intervensi sosial dalam menanggulangi kemiskinan. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan pokok, dan jaminan sosial, serta bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan di kawasan perkotaan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai peran strategis perlindungan sosial dalam kerangka ekonomi publik, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sosial yang berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah perkotaan. Intervensi seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, jaminan kesehatan, dan program pelatihan kerja memberikan dampak positif pada aspek konsumsi, pendapatan, dan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin. Di berbagai jurnal dan laporan kebijakan, ditemukan bahwa perlindungan sosial mampu menjaga daya beli, mengurangi beban pengeluaran, dan membuka akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ekonomi publik, perlindungan sosial menjadi instrumen penting yang tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga mendorong inklusi sosial bagi kelompok marjinal. Efektivitas program sangat bergantung pada desain kebijakan, keakuratan data sasaran, serta konsistensi implementasi di lapangan.

Namun demikian, studi juga mengungkapkan bahwa efektivitas perlindungan sosial belum sepenuhnya merata. Kendala utama seperti data kependudukan yang belum akurat, infrastruktur digital yang terbatas, dan lemahnya koordinasi antarlembaga seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Selain itu, masyarakat penerima manfaat masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan informasi mengenai program, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan jenis bantuan yang diberikan. Untuk itu, perbaikan sistem distribusi, pelatihan kepada pelaksana program, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan agar perlindungan sosial benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan secara jangka panjang. Pendekatan yang terintegrasi dan adaptif dengan dinamika perkotaan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan ekonomi publik.

Tabel 1. Jenis Program Perlindungan Sosial di Perkotaan

No	Nama Program	Bentuk Intervensi	Sasaran Utama
1	Bantuan Langsung Tunai	Transfer uang tunai	Rumah tangga miskin perkotaan
2	Kartu Sembako	Subsidi kebutuhan pokok	Masyarakat rentan dan miskin
3	Jaminan Kesehatan Nasional	Layanan kesehatan gratis	Pekerja informal dan keluarga miskin
4	Kartu Prakerja	Pelatihan dan insentif	Pengangguran dan pekerja terdampak

Penjelasan Tabel 1:

Program perlindungan sosial di perkotaan terdiri dari berbagai bentuk intervensi, mulai dari transfer tunai hingga pemberian layanan dan pelatihan. Tujuannya adalah memberikan dukungan ekonomi langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirancang untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin dalam kondisi krisis ekonomi atau pandemi, sementara program seperti Kartu Prakerja lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi jangka menengah melalui pelatihan keterampilan kerja.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Sembako merupakan bentuk intervensi yang menyangar kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pangan. Dalam kajian pustaka, ditemukan bahwa integrasi antar program sangat penting agar perlindungan sosial tidak tumpang tindih namun saling melengkapi. Efektivitas program juga bergantung pada ketepatan sasaran dan konsistensi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan program-program ini.

Tabel 2. Dampak Program terhadap Aspek Ekonomi Rumah Tangga

No	Aspek Ekonomi	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Daya Beli	Meningkat karena BLT	Fluktuatif saat bantuan berhenti
2	Pengeluaran Harian	Berkurang berkat subsidi	Kembali tinggi jika harga naik
3	Tabungan Keluarga	Sedikit meningkat	Tidak berkelanjutan tanpa program
4	Pendapatan Tambahan	Melalui pelatihan kerja	Belum merata bagi semua penerima

Penjelasan Tabel 2:

Program perlindungan sosial memiliki dampak positif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, terutama dalam hal daya beli dan pengeluaran harian. Bantuan tunai membantu menjaga konsumsi dasar selama masa krisis, sementara subsidi pangan meringankan beban pengeluaran. Namun, tantangan muncul saat bantuan bersifat sementara dan tidak disertai program jangka panjang untuk kemandirian ekonomi, sehingga keluarga kembali rentan setelah program berakhir.

Sementara itu, pelatihan kerja dalam program seperti Kartu Prakerja memberikan dampak positif pada peningkatan keterampilan dan potensi pendapatan tambahan. Akan tetapi, literatur menunjukkan bahwa tidak semua penerima program bisa langsung terhubung dengan

pasar kerja, sehingga dampaknya tidak selalu merata. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi perlindungan sosial dengan strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Tabel 3. Kendala Implementasi Program di Perkotaan

No	Jenis Kendala	Penjelasan	Dampak pada Efektivitas Program
1	Data Kependudukan	Tidak akurat	Penerima bantuan tidak tepat sasaran
2	Infrastruktur Digital	Belum merata	Hambat distribusi bantuan digital
3	Sosialisasi Program	Kurang menyeluruh	Masyarakat tidak memahami manfaat
4	Koordinasi Lintas Lembaga	Lemah	Program berjalan tidak sinkron

Penjelasan Tabel 3:

Berbagai kendala menghambat efektivitas program perlindungan sosial di perkotaan. Salah satu masalah utama adalah keakuratan data kependudukan yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang tidak membutuhkan justru menerima bantuan, sementara yang benar-benar rentan terabaikan. Permasalahan ini sering berkaitan dengan lemahnya pembaruan data dan minimnya verifikasi lapangan.

Kendala lain adalah keterbatasan infrastruktur digital yang menghambat akses masyarakat terhadap bantuan berbasis teknologi seperti transfer nontunai atau pelatihan daring. Selain itu, lemahnya koordinasi antarlembaga dan kurangnya sosialisasi menyebabkan program tidak dikenal secara luas atau tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan sistem manajemen program, pembaruan data secara berkala, dan penguatan kelembagaan pelaksana.

Tabel 4. Strategi Optimalisasi Program Perlindungan Sosial

No	Strategi	Tujuan	Pelaksana
1	Digitalisasi Penerima	Validasi data akurat	Kemensos & Dukcapil
2	Integrasi Program	Cegah tumpang tindih	Pemerintah pusat & daerah
3	Edukasi Masyarakat	Tingkatkan literasi sosial	Lembaga nonformal & media lokal
4	Monitoring & Evaluasi	Perbaikan kebijakan rutin	Bappenas & lembaga audit sosial

Penjelasan Tabel 4:

Optimalisasi program perlindungan sosial memerlukan pendekatan strategis yang sistematis dan berkelanjutan. Digitalisasi data penerima merupakan langkah awal penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat berkolaborasi dalam pembaruan data berbasis NIK untuk menghindari duplikasi dan penyimpangan.

Selain itu, integrasi program antarinstansi sangat penting agar kebijakan tidak berjalan secara terpisah atau saling tumpang tindih. Edukasi masyarakat mengenai manfaat dan prosedur program juga harus diperkuat agar penerima dapat berpartisipasi aktif. Monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan perbaikan kebijakan berdasarkan temuan lapangan dan rekomendasi para ahli. Dengan strategi ini, perlindungan sosial bisa lebih adaptif dan berdampak jangka panjang dalam menurunkan angka kemiskinan di perkotaan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa program perlindungan sosial memainkan peranan vital dalam strategi pengurangan kemiskinan di wilayah perkotaan. Melalui bantuan tunai, subsidi, jaminan layanan dasar, dan program pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial membantu masyarakat miskin bertahan dan berdaya dalam menghadapi tekanan ekonomi. Meskipun banyak keberhasilan yang telah dicapai, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui pembaruan data sasaran, peningkatan kapasitas pelaksana, serta integrasi kebijakan antar sektor. Perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga, sekaligus menjadi instrumen penting dalam kebijakan ekonomi publik yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Andriani, V., & Setyawan, H. (2022). Kemiskinan absolut dan relatif dalam perspektif program perlindungan sosial. *Jurnal Ketimpangan dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 84–96.
- Fadillah, S., & Arifin, M. (2023). Urban poverty dan intervensi negara: Telaah terhadap kebijakan bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Publik Kontemporer*, 6(2), 102–118.
- Lestari, D., & Pranowo, A. (2024). Pembangunan berkelanjutan dan perlindungan sosial: Menjawab tantangan urbanisasi. *Jurnal Pembangunan Inklusif*, 3(1), 88–102.
- Mahendra, F., & Sari, D. (2024). Dampak krisis global terhadap kelompok miskin perkotaan: Analisis program perlindungan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 99–113.

- Putri, A., & Handayani, N. (2021). Perlindungan sosial dan kemiskinan perkotaan: Perspektif ekonomi publik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial*, 10(2), 115–128.
- Rahayu, L., & Wibowo, A. (2020). Kebijakan perlindungan sosial dalam ekonomi perkotaan: Studi literatur ekonomi publik. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 12(1), 71–85.
- Rahmadani, L., & Yusuf, B. (2021). Strategi perlindungan sosial berbasis tiga pilar: teoritis dan implementatif. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 7(1), 45–60.
- Sutanto, I., & Ramadhani, A. (2020). Teori ekonomi publik dalam konteks kebijakan sosial. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 11(2), 77–90.
- Wijaya, K., & Putra, R. (2023). Keadilan sosial dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial di wilayah urban. *Jurnal Etika dan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 67–81.
- Yuliani, R., & Santoso, D. (2022). Evaluasi efektivitas program perlindungan sosial di kawasan perkotaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Indonesia*, 8(1), 54–69.